

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 telah memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia termasuk dari sisi reformasi politik. Setelah tahun 1998 Indonesia telah melakukan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung pada pemilihan umum tahun 2004 serta memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten dengan perubahan sistem pemilu dari daftar calon tertutup dengan calon terpilih berdasar nomor urut, ke daftar calon terbuka dengan calon terpilih berdasar suara terbanyak.

Perubahan dimulai pada tahun 2004 yaitu dimulainya episode baru dalam perubahan politik di Indonesia yang berupa pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rakyat Indonesia saat ini memiliki hak untuk menentukan siapa pemimpin Bangsa Indonesia dalam 5 tahun mendatang, mereka bisa memilih calon presiden dan wakil presiden secara langsung dan demokratis dalam sebuah pemilihan umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada masa

sebelumnya rakyat Indonesia tidaklah memiliki hak untuk memilih presiden pilihan rakyat karena pada sistem yang terdahulu presiden dan wakilnya dipilih oleh para anggota MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dalam sebuah rapat paripurna yang diadakan selama lima tahun sekali.

Sistem yang terdahulu sangat menutup akses bagi rakyat untuk bisa memberikan beberapa nama referensi bagi partai politik untuk bisa memilih pasangan calon yang dikehendaki oleh rakyat. Hal tersebut yang mendorong adanya reformasi politik di Indonesia pada tahun 2004 dengan diadakannya pemilihan langsung presiden dan wakil presiden yang pada akhirnya membawa Indonesia menuju ke arah negara yang demokratis. Demokrasi bukan sekedar prosedur memilih dan mengganti penyelenggara negara melalui penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel, melainkan terutama menyangkut sejumlah prinsip dan tujuan penyelenggara negara. Demokrasi tidak sekedar alat ataupun metode, melainkan tujuan dan prinsip bernegara.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), maka untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia pemilihan umum presiden dan wakil presiden diselenggarakan secara langsung. Rakyat bisa memilih langsung presiden pilihannya sesuai dengan yang mereka inginkan.

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden di Indonesia telah menghasilkan 2 periode pemerintahan. Pada pemilu presiden tahun 2004 menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Dan pada pemilu presiden tahun 2009 kembali Susilo Bambang Yudhoyono dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia berdampingan dengan Boediono sebagai wakil presiden dalam periode pemerintahan tahun 2009 hingga tahun 2014.

Walupun pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan dua kali di Indonesia akan tetapi ternyata dalam pelaksanaannya masih membutuhkan waktu untuk bisa memantapkan nilai-nilai demokrasi yang tertanam dalam pemilihan umum. Pelanggaran pemilu seperti cara-cara menggunakan uang untuk mendapatkan suara atau sering juga disebut sebagai politik uang masih terjadi pada tataran masyarakat sebagai pemilih yang akan menentukan pilihan di bilik suara.

Rakyat yang pada awal-awal reformasi menaruh harapan sangat banyak kepada partai politik untuk melakukan perubahan, ternyata harus menelan kekecewaan. Gairah berpolitik menjadi lesu seiring dengan semakin suburnya praktek politik uang. Suara rakyat dibeli dengan uang tunai. Kalau pada awal pemilu di era reformasi masa kampanye masih menyumbulkan semangat berpolitik rakyat, dikemudian hari, kampanye tak lagi diminati karena “serangan fajar” menjadi lebih efektif. Partisipasi politik digalang dengan organisasi-organisasi bentukan baru yang memiliki satu fungsi mengorganisir massa pemilih dengan bayaran. (Samah,2014)

Banyaknya partai politik ternyata tidak mampu menjadi penyalur aspirasi politik rakyat Indonesia. Partai politik tidak mampu menarik simpati rakyat. Di sisi lain partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di parlemen maupun di eksekutif tidak berhasil mempertahankan reputasinya. Satu per satu tokoh partai politik terjerumus pada penyalahgunaan wewenang saat berkuasa seperti korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja terjadi. Bahkan di tingkatan pemerintahan daerah elite-elite politik yang berhasil memperoleh kekuasaan eksekutif, membangun jaringan-jaringan politik keluarga untuk mempertahankan kekuasaannya. (Samah,2014)

Bukan hanya kasus korupsi saja akan tetapi dominasi dari para elite partai politik masih sering terjadi pada saat waktu pemilihan umum. Dominasi elite menutup ruang rakyat untuk menempatkan sosok yang berkualitas dan berintegritas untuk menduduki pucuk kekuasaan. Dominasi elite menjadikan partai politik tak terlembaga, dan hanya sebatas subordinasi kepentingan para pemimpin partai. (Nugroho,2014)

Tradisi suksesi selama ini menempatkan rakyat hanya sebagai objek para elite politik yang bertarung merebut dan mempertahankan kekuasaan. Mesti rakyat dapat menggunakan hak politik dengan bebas setelah tumbangny rezim Orde Baru pada 1998, rakyat tetap dikondisikan sebagai objek yang hanya dimanfaatkan jelang musim suksesi kepemimpinan negara. Liberalisasi politik yang terdistorsi oleh kekuasaan uang mengakibatkan biaya politik yang sangat tinggi, yang merupakan biang perilaku korup para politisi. (Nugroho,2014)

Bagi elite partai politik, pertimbangan dalam menentukan kandidat lebih bersifat pragmatis, yang berorientasi kekuasaan. Mereka memanfaatkan transisi demokrasi untuk terus-terusan mengukuhkan dominasinya. Sementara itu, rakyat ingin kandidat yang diusung partai politik memiliki rekam jejak yang baik, memiliki integritas, profesional, kompeten, kapabel, dan memenuhi kriteria pemimpin ideal lainnya, yang dapat benar-benar menjalankan mandat kekuasaan yang bertujuan mensejahterakan rakyat. Belum terbangun hubungan simbiosis mutualisme antara rakyat dengan elite politik. Interaksi yang bersifat instan menyebabkan partai politik tidak berhasil membangun basis dukungan yang mengakar. (Nugroho,2014)

Mendekati pelaksanaan pemilihan umum presiden 2014 masyarakat Indonesia diperkenalkan dengan adanya seorang tokoh pemimpin lokal yang memiliki kompetensi yang dinilai cakap untuk menjadi calon presiden 2014. Sosok tersebut adalah Joko Widodo. Lelaki kelahiran Surakarta, Jawa Tengah 21 Juni 1961 yang merupakan seorang walikota di Jawa Tengah yaitu Kota Solo. Ia menjabat sebagai Walikota Solo selama periode tahun 2005-2012. Dan terpilih kembali di periode selanjutnya.

Ketokohan Jokowi mulai dikenal oleh masyarakat luas karena sifatnya yang suka turun langsung ke lapangan untuk melihat keadaan masyarakat. Karena sifatnya tersebut ia lalu dicalonkan untuk meduduki karier politik yang lebih besar lagi yaitu saat memenangi pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan akhirnya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Baru setahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi dinilai layak menjadi Presiden

Republik Indonesia. Sehingga ada sebagian kalangan rakyat yang menginginkan sosok Jokowi maju sebagai calon presiden pada pemilihan presiden 2014.

Akan tetapi wacana untuk mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden memiliki hambatan yang cukup besar. Yaitu masih adanya mitos yang berkembang di Indonesia apabila ada seseorang ingin menjadi Presiden Indonesia, orang itu harus berasal dari trah elite. (Nugroho,2014) Di Indonesia selalu menempatkan “bos partai” atau ketua umum partai politik sebagai sosok yang paling berhak mendapatkan tiket untuk berlaga di panggung pemilihan umum presiden.

Selama ini para petinggi partai politik memang selalu memonopoli akses menuju kekuasaan negara. Sementara itu, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak diberikan ruang untuk mengusung calon presiden sesuai kehendaknya. (Nugroho,2014) Jokowi bukan ketua umum partai politik yang bisa memerintahkan seluruh kader dan simpatisan partainya untuk tunduk padanya. Sebagai kader biasa, ia tak bisa pula mengklaim dirinya sebagai calon presiden berdasarkan kehendak pribadi.

Namun tiket untuk maju sebagai calon presiden bisa didapatkan Jokowi apabila rakyat berkehendak. Rakyat menobatkannya sebagai pemimpin yang lahir dan besar dari rakyat. Dukungan dari rakyat itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Jokowi memupuk dukungan tersebut sejak diberikan kepercayaan menjadi pemimpin yang bersahaja saat menjabat Walikota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta.

Tipikal kepemimpinan Jokowi itu rupanya diapresiasi sejumlah kalangan di masyarakat seperti kalangan aktivis, akademisi, pengusaha, politisi dan sejumlah pihak lainnya. Jokowi dianggap sebagai harapan baru dalam kepemimpinan di Indonesia. Mereka yang mengapresiasi kepemimpinan Jokowi kemudian berikrar untuk menjadikan Jokowi sebagai calon presiden dan memenangkannya di pemilu presiden 2014. Mereka yang mengapresiasi kepemimpinan Jokowi akhirnya membentuk simpul-simpul relawan untuk mendukung Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan umum 2014 adalah pemilu keempat di era reformasi. Sedangkan pemilihan umum Presiden 2014 adalah pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang ketiga kali. Pemilu 2014, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden, diselenggarakan di tengah kejenuhan dan sikap skeptis rakyat terhadap politik. Hal ini adalah akibat kasus korupsi yang terus menghiasi pemberitaan media massa sepanjang periode 2009-2014. Partai dan elit politik kehilangan pamor, bahkan cenderung dipandang sinis oleh publik.

Pada pemilu presiden dan wakil presiden 2014 hanya terdapat dua calon pasangan yang bersaing untuk mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia. Kedua pasangan tersebut adalah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-M.Jusuf Kalla. Pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didukung oleh partai-partai besar yang antara lain Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhir-akhir

ini koalisi pendukung pasangan Prabowo-Hatta sering menyebut mereka adalah Koalisi Merah Putih.

Sedangkan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari Partai PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Keadilan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Koalisi pendukung pasangan Jokowi-JK sering menyebut diri sebagai Koalisi Indonesia Hebat.

Yang menarik dari pemilihan umum presiden 2014 dari kedua pasangan calon tersebut adalah sama-sama menyatakan bahwa mereka didukung oleh simpul-simpul kekuatan masyarakat yang menyatakan diri sebagai relawan yang memberikan sumbangan berupa tenaga, dukungan, dan ide kepada kedua pasangan tersebut tanpa mau diberi imbalan tertentu.

Tumbuhnya relawan baik yang bergerak sendiri maupun berkelompok, membedakan pemilihan presiden 2014 dengan hajatan yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Pada pemilihan langsung pertama, sepuluh tahun silam, pergerakan politik betul-betul dilakukan partai pendukung atau kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan sang kandidat. Hal yang kurang lebih sama terlihat lima tahun berikutnya. (Tempo, 15 Desember 2014)

Lahirnya fenomena dukungan masif yang diberikan oleh para relawan terutama kepada pasangan Jokowi-JK karena terdapat dua faktor. Pertama, calon presiden Joko Widodo secara historis berhadapan dengan calon presiden yang mewakili masa Orde Baru, Prabowo Subianto ia adalah mantan menantu Presiden

Soeharto dan dikenal memiliki rekam jejak buruk soal pelanggaran Hak Asasi Manusia. Simbol Orde Baru melekat pada Prabowo. (Nugroho,2014)

Keterlibatannya dalam penculikan aktivis Pro-Demokrasi menjelang era reformasi seolah-olah “tertutupi” ketertampilannya memotret diri sebagai tokoh yang tegas. Potret diri Prabowo itu dianggap sebagai antithesis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kerap dipersepsikan peragu. Kedua, Prabowo bertolak belakang dengan Jokowi, yang justru tekun mendengarkan keluhan “orang bawah”. Jokowi populer dan mewakili publik kebanyakan. Orang ramai mengharapkan kepemimpinan sipil, mereka yang bergerak di luar birokrasi dan partai inilah yang membangkitkan fenomena relawan. (Tempo,3 Agustus 2014)

Salah satu yang membuat Jokowi bertahan sebagai calon presiden adalah elektabilitasnya yang tak tertandingi kandidat manapun yang mewacanakan maju sebagai calon presiden dalam pilpres 2014. (Tempo, 3 Agustus 2014) Pesona Jokowi dan dukungan dari relawan mungkin juga kecemasan terhadap munculnya militerisme ada kembali di Indonesia sehingga membuat relawan bekerja dalam skala yang masif membela sang kandidat.

Dukungan dari para relawan kepada Jokowi-JK diberikan dengan berbagai macam cara. Ada relawan yang bergerak di media sosial seperti relawan yang menamakan diri Jasmev akronim dari Jokowi Advanced Social Media Volunteers. Fokus dari relawan ini adalah mengungkapkan berbagai kelebihan atau nilai plus Jokowi melalui media sosial sekaligus menghantam dan meluruskan jika muncul kampanye hitam kepada Jokowi. (Tempo,15 Desember 2014) Kampanye Hitam memang sangat marak terjadi pada pemilihan umum

presiden 2014. Propaganda hitam itu dilakukan untuk menjatuhkan lawan politik untuk meraup suara pemilih sebanyak-banyaknya. Mereka menggunakan berbagai sarana dan media. Di media sosial, misalnya muncul isu yang menyebutkan calon presiden Joko Widodo merupakan keturunan orang Tionghoa dari Singapura. Isu ini menjadi topik utama di media sosial. (Tempo, 29 Juni 2014)

Para relawan Jokowi membalas kampanye hitam dengan cara yang berbeda-beda, Jasmev membela Jokowi di media sosial. Relawan yang lainnya membela Jokowi dengan cara menyebarkan informasi kepada masyarakat di lapangan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan pribadi Jokowi untuk menangkal isu kampanye hitam dari pasangan calon lainnya.

Relawan yang mendukung Jokowi-JK memanglah sangat banyak. Berikut ini 18 organisasi relawan yang cukup besar yaitu Seknas Jokowi, Pro Jokowi (PROJO), Garda Pemuda NasDem, Garda Bangsa, Jasmev, Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP), Pusat Informasi Relawan Jokowi-JK, Duta Jokowi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat), Posko Perjuangan Rakyat (Pospera), Entrepreneur and Professional for Jokowi (EP for Jokowi), Kebangkitan Indonesia Baru (KIB), Aliansi Rakyat Merdeka (ARM), Forum Alumni Perguruan Tinggi, Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB), Jengala Center, Kawan Jokowi, dan Revolusi Harmoni. (Samah,2014)

Adapula sejak masa kampanye Jokowi-JK, relawan terbagi dalam tiga *cluster*. Pertama, relawan darat seperti PROJO, Pusat Informasi Relawan, Seknas, dan ratusan kelompok lain. Kedua, para relawan di media sosial. Dan ketiga, kelompok relawan seniman salah satu seniman tersebut adalah Abdee Negara,

gitaris grup *band* Slank yang mempunyai peran membuat konser “Salam 2 Jari” di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 5 Juli 2014. Konser itu sukses. Sekitar seratus ribu orang memadati stadion. (Samah,2014)

Salah satu basis relawan darat yang terbesar dan memiliki struktur organisasi yang cukup luas adalah Relawan Pro Jokowi (PROJO) dideklarasikan dan didirikan di Jakarta pada 21 Desember 2013 yang mengukuhkan diri adalah sebagian kader dan simpatisan PDI Perjuangan. Namun pada acara Rembug Nasional di Depok, 12 Maret 2014, mereka kembali dikukuhkan. Pendiri PROJO adalah beberapa kader dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) yang mendeklarasikan dukungannya untuk Joko Widodo sebagai calon presiden 2014 yang dinamakan Pro Jokowi (PROJO). PROJO diprakarsai kader dan aktivis UI 1998 seperti Budi Arie Setiadi, Fahmi Alhabsyi, Jonacta Yani, dan Firmansyah. Serta simpatisan dari paguyuban warga kota-kota di Jawa Tengah yang tinggal di Jakarta.

Relawan PROJO dibentuk pada awalnya adalah merupakan upaya dari sebagian kecil kader partai PDI Perjuangan yang menginginkan Joko Widodo yang waktu itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk bisa dicalonkan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Karena pada waktu itu ada skenario duet Mega-Jokowi ke pilpres 2014. Simpatisan yang kecewa dengan skenario pencapresan kembali Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun menggulirkan PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO). (<http://Detikcom>.diakses 23 Desember 2013)

"Kami segenap kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang lahir, hidup dan besar dari rahim dan nafasnya rakyat, sepakat membentuk PDI Perjuangan Pro Jokowi (PROJO) untuk memperjuangkan dan mendukung Jokowi sebagai presiden RI 2014 untuk menyelesaikan semua persoalan bangsa," ujar Budi Arie Setiadi, S. (<http://Detikcom.diakses> 23 Desember 2013)

PROJO meyakini Jokowi adalah pemimpin yang jujur dan berani. Saat ini, bagi mereka, rakyat membutuhkan pemimpin yang mampu membawa perubahan sejati dan membawa bangsa ke arah kemajuan. Gerakan ini dijadikan wadah bagi kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang mendukung pencapresan Jokowi. Setelah dideklarasikan PROJO semakin berkembang di wilayah-wilayah lainnya terutama di Pulau Jawa.

Para pemrakarsa PROJO yang dulunya juga pendiri Posko Megawati Gotong Royong pada tahun 1998 berharap Megawati mendengarkan aspirasi mereka soal pencapresan Jokowi. Budi Arie menyebutkan PROJO akan didirikan di daerah-daerah seluruh Indonesia. "Selama Januari ini kita optimalkan pendirian-pendirian posko di daerah, supaya orang bisa melihat dukungan untuk Jokowi ini riil." (<http://Detikcom.diakses> 23 Desember 2013)

Pendiri PROJO lainnya, Jonacta Yani, mengatakan posko-posko di daerah akan menampung keluhan dari masyarakat. Tujuannya, berbagai persoalan ini akan ditampung dan dituangkan kedalam agenda rakyat. Agenda rakyat merupakan suatu rumusan kebijakan dan program-program untuk bekal Jokowi dalam pilpres mendatang.

Salah satu basis wilayah kekuatan relawan PROJO yang berdiri dan memiliki peran cukup penting dalam masa pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 adalah relawan PROJO Jawa Timur. Dukungan kepada Joko Widodo menjadi calon presiden kian meluas. Simpatisan relawan PROJO Jawa Timur mendeklarasikan dukungan di Jawa Timur dengan mengkonsolidasikan gerakan pada hari Sabtu, 22 Februari 2014 bertempat di Warung Ngelecer Masjid Cheng Ho Pandaan, Malang. Relawan PROJO dideklarasikan sebagai bentuk dukungan sebagian masyarakat Jawa Timur yang mendukung Joko Widodo maju menjadi calon presiden 2014.

Penggagas relawan PROJO Jawa Timur yang juga Koordinator LSM Koalisi Rakyat Bersatu (Kareb) Jawa Timur, Madchan Hadirusyanto, mengatakan pembacaan dan penandatanganan Deklarasi Pro Jokowi (PROJO) Jawa Timur dihadiri Koordinator PROJO Jawa Tengah, Gunawan Wirosaroyo, serta ratusan simpatisan. Relawan PROJO Jawa Timur ini dibentuk atas prakarsa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Rakyat Bersatu (Kareb), sejumlah tokoh masyarakat, beberapa alumni dari Pemuda Demokrat, alumni dari Organisasi GMNI, SPSI, dan beberapa perwakilan dari petani Tuban.

“Kareb sebagai sebuah LSM yang menyuarakan suara dari masyarakat yang jatuh cinta dengan sosok Jokowi yang bersifat jujur, sederhana, dan apa adanya”, kata Madchan Hadi, koordinator LSM Kareb Jawa Timur. Selain itu, masyarakat ingin adanya perubahan dengan naiknya Jokowi menjadi calon presiden pada pemilu presiden 2014.

Relawan PROJO Jawa Timur muncul dikarenakan adanya sebuah dukungan dari masyarakat yang menginginkan sosok muda, sederhana, dan tidak memiliki catatan buruk pada masa lampau. Relawan PROJO Jawa Timur lahir karena empati dan simpati kepada sosok Jokowi. Jokowi dianggap sebagai orang yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan Negara Indonesia. Relawan PROJO Jawa Timur juga hadir dalam upaya menolak adanya wacana pada waktu itu untuk menjadikan Megawati Soekarno Putri menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Relawan PROJO Jawa Timur merekomendasikan sosok Jokowi agar bisa dimajukan sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan dengan pertimbangan yang ada pada waktu itu.

Setelah adanya surat harian Megawati pada Jumat 14 Maret 2014 yang berisikan Jokowi diberi mandat sebagai calon presiden oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri maka Jokowi telah resmi maju sebagai calon presiden. Dengan majunya Jokowi menjadi calon presiden maka relawan PROJO Jawa Timur semakin kuat untuk mendukung Jokowi dengan berbagai cara dan dengan unsur sukarela mengeluarkan *kocek* sendiri untuk membiayai setiap kegiatan.

Dukungan kepada Jokowi dilakukan dengan cara bergotong royong antar sesama relawan PROJO Jawa Timur untuk melakukan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan proses dukungan bagi pasangan Jokowi-JK. Relawan PROJO Jawa Timur selama masa kampanye Jokowi-JK ikut serta dalam kegiatan kampanye dan juga selama proses perhitungan suara di TPS-TPS. Relawan

PROJO Jawa Timur diikutkan menjadi saksi atau peninjau jalannya proses perhitungan suara di TPS-TPS di Jawa Timur.

Setelah Jokowi terpilih menjadi pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014, relawan PROJO Jawa Timur tidak membubarkan diri sebagai kekuatan relawan karena adanya permintaan dari presiden terpilih Jokowi supaya simpul-simpul relawan tidak membubarkan diri dan ikut berperan serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan selama lima tahun mendatang. Pendapat dari Jokowi tersebut akhirnya direspon oleh Relawan PROJO Nasional yang akhirnya memutuskan untuk tidak membubarkan diri melainkan berubah bentuk menjadi organisasi massa pada tanggal 23 Agustus 2014 pada saat Kongres Pertama PROJO di Jakarta.

Perubahan dari kekuatan relawan lalu menjadi organisasi massa juga dilakukan oleh relawan PROJO Jawa Timur. Relawan PROJO Jawa Timur merespon permintaan presiden terpilih Jokowi agar relawan tidak membubarkan diri dengan cara menguatkan struktur kepengurusan Ormas PROJO Jawa Timur hingga pada akhirnya Ormas PROJO Jawa Timur ada di tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur hingga pada tingkatan ranting.

Ormas PROJO Jawa Timur juga merupakan barometer bagi pengurus PROJO lainnya di daerah lainnya di Indonesia dikarenakan ormas PROJO Jawa Timur sampai saat ini adalah Ormas PROJO yang sudah memiliki struktur terlengkap dan sering melakukan konsolidasi untuk merapatkan barisan serta untuk merampungkan struktur organisasi yang masih tersisa.

Sehingga pada saat ini basis relawan yang mendukung pasangan Jokowi-JK selama masa kampanye yang tidak membubarkan diri dan menjadi organisasi massa saat ini hanyalah PROJO. Dengan berubah menjadi organisasi massa maka relawan PROJO menarik untuk dikaji dengan pendekatan teori partisipasi politik. Partisipasi politik menurut Huntington adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dan bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Dan pada akhirnya pada karya tulis ini kita akan melihat berbagai bentuk kegiatan partisipasi politik yang dilakukan oleh relawan PROJO terutama di wilayah Jawa Timur sebagai sebuah bentuk kekuatan relawan yang ikut serta mendukung pasangan Jokowi-JK agar memenangi pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.

I.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk partisipasi politik relawan PROJO Jawa Timur dalam memberikan dukungan kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-JK ?
2. Apakah dukungan yang diberikan relawan PROJO Jawa Timur memiliki unsur kepentingan politik tertentu ?

I.3. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Politik Relawan Pro Jokowi di Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Presiden 2014” tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Mengetahui apa saja bentuk partisipasi politik yang dilakukan relawan PROJO Jawa Timur dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014.
2. Untuk mengetahui unsur kepentingan politik yang diberikan oleh relawan PROJO Jawa Timur.

I.4 . Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Partisipasi politik relawan Pro Jokowi di Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan umum Presiden 2014 diharapkan dapat dimanfaatkan untuk :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan adanya manfaat bagi keilmuan, utamanya pengembangan Ilmu Politik yang mengkaji mengenai bentuk-bentuk partisipasi politik masyarakat. Disamping itu dari sudut pandang penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan perbandingan bagi penelitian lainnya terutama yang berhubungan dengan kegiatan partisipasi politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana upaya partisipasi politik yang dilakukan oleh PROJO Jawa Timur dalam mendukung pasangan Jokowi-JK di pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di wilayah Jawa Timur. Secara khusus penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsikan fenomena relawan yang terjadi pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 di Jawa Timur.

I.5 Kerangka Teori

I.5.1 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik didefinisikan secara luas atau sempit oleh berbagai penulis tergantung dari pendekatannya. Kajian klasik partisipasi politik oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *“Handbook of Political Science”* mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal dan sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara atau daerah. Sementara itu Richardson (1996) dan Cuncill (1991) mencoba menghubungkan partisipasi politik dengan demokrasi politik. Partisipasi diungkapkan dalam tindakan perorangan dan kolektif yang mencakup pemungutan suara, kampanye, kontak, tindakan kelompok, dan protes yang semuanya diarahkan untuk mempengaruhi wakil-wakil pemerintah.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam *“No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries”* yang mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi dan bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, dengan cara-cara damai atau dengan cara-cara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Di negara-negara yang demokratis, pemikiran konsep mengenai partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang melaksanakan kedaulatan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat kedepannya melalui

menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan kekuasaan negara atau daerah melalui mekanisme partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Di negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Jadi partisipasi politik merupakan suatu pemilihan penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Mendukung pasangan Jokowi-JK dengan semangat relawan hal ini didasari oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan mendukung pasangan tersebut termasuk dalam partisipasi politik. Kepentingan mereka akan tersalurkan atau sekurang-kurangnya diperhatikan dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan-tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan-keputusan yang mengikat.

Para ilmuwan politik yang mengamati masyarakat demokrasi barat juga cenderung berpendapat bahwa yang dinamakan partisipasi politik hanya terbatas pada kegiatan sukarela saja, yaitu kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan atau tekanan dari siapa pun. Termasuk dalam kelompok ini adalah ilmuwan politik seperti Herbert Mc Closky, Gabriel Almond, Norman H.Nie, dan Sidney Verba. Adapula yang berpendapat dari Weine yang mengatakan bahwa partisipasi politik bersifat sukarela sehingga tindakan-tindakan masyarakat yang tidak didasari pada aspek sukarela tidaklah masuk dalam partisipasi politik.

Pandangan lain mengenai definisi partisipasi politik diutarakan oleh Miriam Budiardjo yang mengatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. (Budiardjo,2008)

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan. Kegiatan yang dimaksud antara lain, mengajukan tuntutan, membayar pajak, melaksanakan keputusan, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin, dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. (Surbakti,1992)

Partisipasi politik masyarakat memiliki kaitan dengan sistem politik serta perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Meluasnya partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa hal, yang oleh Weimer disebutkan paling tidak ada lima. (Nelson,1990) Dari kelima hal yang dapat menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi yang lebih luas dalam proses politik itu yang pertama ialah modernisasi. Modernisasi di segala bidang seperti pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan pengembangan media massa/media komunikasi secara lebih luas. Kemajuan itu berakibat pada partisipasi warga kota seperti kaum buruh, kaum pedagang, dan profesional untuk ikut serta mempengaruhi kebijakan dan

menuntut keikutsertaan dalam kekuasaan politik sebagai bentuk kesadarannya bahwa mereka dapat mempengaruhi nasibnya sendiri.

Faktor yang kedua adalah terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Perubahan struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi dan modernisasi. Dari hal itu muncul persoalan yaitu siapa yang berhak ikut serta dalam pembuatan keputusan-keputusan politik yang akhirnya membawa perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa merupakan faktor meluasnya partisipasi masyarakat. Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang meluas mempermudah penyebaran ide-ide itu ke dalam seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang belum maju sekalipun akan dapat menerima ide-ide politik tersebut secara tepat. Hal itu berimplikasi pada tuntutan-tuntutan rakyat dalam ikut serta menentukan dan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Faktor keempat ialah adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini mereka beranggapan adalah sah apabila yang mereka lakukan demi kepentingan rakyat dan dalam upaya memperjuangkan ide-ide partisipasi massa. Implikasinya adalah munculnya tuntutan terhadap hak-hak rakyat, baik hak asasi manusia, keterbukaan, demokratisasi, maupun isu-isu kebebasan pers. Dengan

demikian pertentangan dan perjuangan kelas menengah terhadap kaum bangsawan yang memegang kekuasaan mengakibatkan perluasan hak pilih rakyat.

Sebab kelima, menurut Weimer ialah adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Huntington mendefinisikan partisipasi politik mencakup tidak hanya kegiatan yang dilakukan oleh pelakunya sendiri untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Huntington juga membagi partisipasi politik menjadi dua yaitu pertama, dinamakan partisipasi otonom. Kedua, partisipasi yang dimobilisasikan merupakan sebuah gagasan partisipasi yang dirangsang untuk bertingkah laku dengan cara-cara yang bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah, tanpa mereka pribadi menaruh minat terhadap, atau malahan harus menyadari dampak dari tindakan mereka itu terhadap pemerintah. (Nelson,1990)

Mereka bertindak atas intruksi dan mereka sebagian besar atau sepenuhnya digerakan oleh loyalitas, rasa cinta, rasa hormat atau rasa takut, terhadap seorang pemimpin, atau oleh hasrat untuk memperoleh manfaat-manfaat yang mereka percaya pendapat diberikan oleh pemimpin itu. Masalah niat dan persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi partisipasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial.

Partisipasi politik dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. (Nelson,1990) Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut:

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, dan oleh sebab itu faktor-faktor yang berkaitan dengan kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan-kegiatan lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk lainnya dari tindakan politik.
- b. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Contohnya yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif.

- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya yang utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usah-usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi yang demikian itu, pada dirinya sendiri, sudah merupakan satu bentuk partisipasi politik tak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak dalam upaya-upaya organisasi itu untuk mempengaruhi pemerintah. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain.
- d. Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditunjukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang tahu segelintir orang. Dalam hal ini Huntington mengikuti Verva, Nie, dan Kim yang sampai kepada kesimpulan bahwa mencari koneksi khusus merupakan satu cara partisipasi politik yang terpisah dari, dan hampir tak ada kaitannya sama sekali, dengan cara-cara lainnya.

I.6. Kerangka Konseptual

I.6.1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden

Pemilihan umum presiden dan wakil presiden adalah proses pemilihan individu yang akan mengisi jabatan politik sebagai seorang pemimpin negara baik

presiden atau wakil presiden. Pemilihan umum yang selanjutnya disingkat pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Proses tersebut diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Di dalam pemilu yang menentukan siapa yang akan mengisi jabatan politik tertentu adalah rakyat. Rakyat akan datang pada saat hari pencoblosan suara untuk memilih yang sesuai dengan preferensi masing-masing individu. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia.

I.6.2. Partisipasi

Partisipasi berasal dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam Bahasa Indonesia yaitu mengambil bagian atau turut serta. Sastrodipoetra (Rohman,2009) menyatakan partisipasi sebagai “keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”. Alastraire White (Rohman, 2009) menyatakan partisipasi sebagai “keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan”.

Rahnema (Rohman,2009) menyatakan partisipasi sebagai “*the action or fact of partaking, having or forming a part of*”. Dalam pengertian ini, partisipasi

dapat bersifat transitif atau intransitif, dapat pula bermoral atau tak bermoral. Kandungan pengertian tersebut juga dapat bersifat dipaksa atau bebas dan dapat pula bersifat manipulatif maupun spontan. Partisipasi transitif berorientasi pada tujuan tertentu, sebaliknya, partisipasi bersifat intransitif apabila subjek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi memenuhi sisi moral apabila tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan etika. Dalam pengertian ini, partisipasi mengandung konotasi positif.

Partisipasi dapat dibedakan apabila bersifat manipulatif atau spontan. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipan diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. (Rohman,2009)

Charly (Rohman, 2009) menyatakan partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemauan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama dalam pertanggungjawabannya. Dengan kata lain partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang atau kelompok masyarakat dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri menurut kemampuan (swadaya) yang ada untuk mengambil bagian dalam usaha pencapaian tujuan bersama.

Fokus partisipasi adalah pada keterlibatan mental dan emosional. Kehadiran secara pribadi/fisik semata-mata dalam suatu kelompok. Tanpa

keterlibatan tersebut bukanlah partisipasi. Selain itu terdapat kesediaan untuk memberikan kontribusi tergerak. (Rohman,2009)

I.6.3. Relawan

Relawan berarti orang yang rela, bersedia tanpa syarat, untuk melakukan aktivitas tertentu. Relawan adalah orang yang bekerja dengan semangat pengabdian dan karenanya mereka bekerja mengabdikan dirinya tanpa pamrih. Mereka bekerja tanpa tendensi kepentingan. Kalaupun ada kepentingan tersirat, itu kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan

Politik hampir identik dengan kepentingan. Adagium-adagium politik sudah jelas, misalnya dalam politik tak ada kawan yang abadi, tak ada lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Hal ini menggambarkan betapa kepentingan itu melekat dalam politik. Adagium lain mengatakan, dalam politik, *"there is no such thing as a free lunch"*, tak ada yang namanya makan siang gratis. Itu berarti hampir mustahil jika berpolitik tanpa kepentingan, termasuk mendukung kegiatan politik seseorang yang sedang berpolitik, tanpa kepentingan tertentu. Kepentingan dalam politik bisa bermacam-macam, bisa saja berupa harta (uang) atau juga takhta (kekuasaan, jabatan).

I.7. Metode Penelitian

I.7.1. Pendekatan dan Fokus Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Lisa Harrison pendekatan kualitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasi sedetail mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang

dipandang menarik dan mencerahkan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam, bukan luas.

Penggunaan metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif juga berupaya mengungkap keunikan individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari adalah karakter khusus dari suatu penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam atau *in depth interview* dan observasi guna mendapatkan validitas yang tinggi dan bisa mendapatkan gambaran utuh mengenai fenomena serta menemukan kaitan-kaitan peristiwa yang ada di dalamnya

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan terjun ke lapangan dengan mewawancarai beberapa anggota relawan PROJO Jawa Timur. Serta mengikuti beberapa kegiatan acara yang dilaksanakan oleh PROJO Jawa Timur dengan demikian peneliti dapat menceritakan secara lengkap temuan-temuan yang ditemukan oleh peneliti di lapangan.

Alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah peneliti ingin mengungkapkan secara mendetail tentang bentuk partisipasi relawan PROJO Jawa Timur dalam mendukung pasangan Jokowi-JK di pemilihan umum presiden dan

wakil presiden 2014. Serta ingin mengetahui kepentingan politik apa yang diusung oleh para relawan PROJO Jawa Timur selama pilpres dan juga pasca pilpres 2014.

Fokus penelitian ini ditunjukkan kepada relawan PROJO Jawa Timur. Pertimbangan peneliti memilih berfokus pada kegiatan partisipasi politik relawan PROJO Jawa Timur karena peneliti melihat adanya kegiatan partisipasi politik aktif yang dilakukan relawan PROJO Jawa Timur selama masa pilpres 2014. PROJO Jawa Timur juga merupakan barometer bagi pengurus daerah PROJO lainnya di Indonesia karena struktur kepengurusan yang dimiliki PROJO Jawa Timur sudah menyebar ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

I.7.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif yakni berusaha mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan dengan berupaya mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti.

I.7.3. Subyek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah informan penelitian. Dari informan diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Untuk penelitian ini, informan ditentukan dengan cara *purposive* (disengaja) atas dasar kriteria tertentu. Adapun subjek atau informan yang dipilih adalah Pengurus Depan Pimpinan Daerah (DPD) relawan PROJO Jawa Timur ataupun Koordinator relawan PROJO ditingkatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Jawa Timur.

Seperti Ketua DPD PROJO Jawa Timur Madchan Hadi Rusyanto, wakil sekretaris 1 PROJO Jawa Timur Tomi Hartono Wibowo, sekretaris 2 PROJO Jawa Timur Miftakhul Ulum, dan Saronu Ketua DPC PROJO Madiun. Diharapkan dengan wawancara mendalam peneliti akan menemukan dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian sudah ditentukan secara sengaja yakni di Kota Surabaya (Jawa Timur) lokasi dipilih karena merupakan domisili peneliti dan juga domisili dari informan relawan PROJO Jawa Timur.

1.7.4 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang masih bersifat terbuka dengan tujuan agar diperoleh jawaban yang lebih luas, lebih rinci, lebih detail, dan lebih mendalam. Di dalam melakukan proses wawancara peneliti dibantu alat perekam dan buku catatan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang *valid* dan *realeable*.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Adalah cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang sebaik-baiknya sehingga dengan begitu data dapat diklasifikasikan dan diolah serta dianalisis sesuai dengan kerangka metode penelitian. Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik observasi untuk mengamati gejala-gejala yang terjadi dalam sebuah komunitas atau lembaga. Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang tidak bisa diperoleh dengan memahami metode lain. Dengan teknik ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi yang diketahui oleh responden dengan cara mewawancarai informan. Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara juga merupakan metode yang tepat untuk pengumpulan data tentang subjek kontemporer yang belum dikaji secara ekstensif dan tidak banyak literatur yang membahasnya. Informasi yang diberikan oleh informan dianggap sebagai sebuah pendapat pribadi informan dan bukan sebuah pendapat yang secara struktural atau organisasi.
3. Dokumentasi merupakan cara bagi peneliti untuk memperoleh data dari buku, jurnal, foto, surat kabar, majalah, *website* dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses yang terpenting dalam suatu penelitian karena adanya analisis data ini dapat mempermudah kita membaca suatu hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan tiga komponen analisis data yaitu :

1. Reduksi data, pada tahap ini data-data yang berkaitan dengan kepentingan penulisan diambil dan dikumpulkan dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Pengujian data, tahap ini data-data yang diambil atau dikumpulkan dilapangan selanjutnya diolah berdasarkan temuan–temuan atau fakta fakta yang ada.

3. Kesimpulan data, data-data yang telah dikumpulkan di lapangan dan setelah diolah kemudian disimpulkan dan diverifikasi berdasarkan fakta yang ditemukan untuk mengembangkan intersubjektif atau temuan pada salinan dan data yang lain. Tahap ini juga disebut sebagai tahap finalisasi data.

